

ABSTRAK

Perkembangan Penyalahgunaan *New Psychoactive Substances* atau yang biasa disebut dengan NPS setiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai dari jumlah perkara hingga jumlah jenis yang menyebar di masyarakat. Dalam hal ini, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum untuk penanganan NPS, dikarenakan terdapat jenis NPS yang belum masuk ke dalam regulasi Hukum di Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab kekosongan hukum pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 akan berdampak buruk terhadap penegakkan hukum di Indonesia serta Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai Instansi vertikal BNN dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika khususnya NPS.

Metode penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini bersifat deskriptif, dengan digabungkan jenis data penelitian kuantitatif, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi serta di kuantifikasi secara angka dan menggunakan tabel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi memiliki Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, namun belum memiliki Upaya secara spesifik untuk penanganan NPS. Selain itu, terdapat kekosongan hukum pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab banyak jenis NPS yang baru dan belum masuk ke dalam regulasi manapun, sehingga berdampak buruk terhadap penegakkan hukum untuk NPS di Indonesia.

Kata kunci :Narkotika Jenis Baru, Penanggulangan, Penyalahgunaan.

ABSTRACT

The development of the abuse of New Psychoactive Substances or what is commonly referred to as NPS has increased every year, from the number of cases to the number of types that are spreading in society. In this case, it causes a legal vacuum to handle NPS, because there are types of NPS that have not been included in legal regulations in Indonesia. This is interesting to study because the legal vacuum in Law Number 35 of 2009 will have a negative impact on law enforcement in Indonesia and the role of the East Java Province National Narcotics Agency as a vertical agency of the National Narcotics Agency in tackling Narcotics Abuse, especially the NPS.

The research method used in this thesis is Empirical. The approach used in this study is descriptive in nature, combining quantitative research data types, because the data needed in this study are in the form of distributions of information and are quantified numerically and using tables.

The results of this study indicate that the Provincial National Narcotics Agency has Efforts to Overcome Narcotics Abuse, but does not yet have Efforts specifically for handling NPS. In addition, there is a legal vacuum in Law number 35 of 2009 concerning Narcotics because many types of NPS are new and have not been included in any regulations, thus having a negative impact on law enforcement for NPS in Indonesia.

Keywords: Abuse, Countermeasures, New Psychoactive Substances.

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
1.4.1 Kegunaan Teoritis	3
1.4.2 Kegunaan Praktis	3
1.5 Keaslian Penelitian	4
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Sifat Penelitian	8
1.7 Pendekatan Penelitian.....	8
1.7.1 Lokasi Penelitian	8
1.7.2 Jenis Data Penelitian	9
1.7.3 Sumber Data Penelitian	9
1.8 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.8.1 Teknik Analisis Data	10
BAB II	11
TINJAUAN UMUM.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	13

2.2 Penanggulangan Penyalahgunaan <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS).....	14
2.2.2 Penyalahgunaan <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS).....	16
2.2.3 Tindak Pidana Narkotika <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS).....	17
2.3 Daftar <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS)	17
2.3.1 <i>New Psychoactive Substances</i> yang masuk ke dalam Regulasi	17
2.3.2 NPS yang belum Diatur di Indonesia.....	34
2.4 <i>New Psychoactive Substances</i> sebagai Prekursor.....	35
BAB III.....	37
3.1 Penanggulangan Penyalahgunaan <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS) Oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Timur	37
3.1.1 Regulasi Hukum terhadap <i>New Psychoactive Substances</i>	40
3.1.2 Upaya Yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur	44
3.2 Konsekuensi <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS) yang tidak tercantum dalam regulasi Hukum.....	61
BAB IV	66
PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Data New Psychoactive Substances 2019-2022.....	39
Gambar 2 Data kasus New Psychoactive Substances 2021-2022.....	40
Gambar 3 Tahapan Penyusunan Renstra BNN 2020-2024.....	47
Gambar 4 Tahapan Penyusunan Renstra BNN 2020-2024.....	47
Gambar 5 Faktor Penyalahgunaan Narkoba.....	55
Gambar 6 Program Pengobatan oleh BNNP Jawa Timur.....	59

DAFTAR SINGKATAN

BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
NPS	: <i>New Psychoactive Substances</i>
RENSTRA	: Rencana Strategis

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Daftar NPS yang masuk dalam Regulasi.....	19
TABEL 2. Daftar NPS yang belum masuk dalam Regulasi.....	35